

ABSTRAK

Keberadaan PMC dalam konflik bersenjata seringkali menimbulkan pelanggaran HAM, HHI dan Hukum kebiasaan Internasional, sebab status hukum mereka yang masih tidak jelas dan tidak sedikit negara yang belum mempunyai regulasi nasional yang mengatur PMC. Selain itu keberadaan PMC dalam konflik bersenjata juga menimbulkan pertanyaan terkait siapakah yang bertanggungjawab ketika personil PMC melakukan pelanggaran didalam konflik bersenjata. Oleh karenanya berdasarkan permasalahan diatas maka penulis mempunyai ketertarikan untuk mengkaji terkait status hukum PMC serta pertanggungjawabannya ketika melakukan pelanggaran dalam konflik bersenjata. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi status hukum PMC saat terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata dan siapakah yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh personil PMC.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Untuk bahan hukumnya digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan untuk teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan teknik studi literatur atau kepustakaan, dan untuk analisisnya digunakan metode analisis bahan hukum secara deduktif.

Setelah dilakukan penelitian, diperoleh hasil bahwa status hukum PMC ketika terlibat secara langsung didalam konflik bersenjata adalah sebagai *unlawfull combatant* (kombatan yang tidak sah) serta tidak berhak untuk mendapatkan status sebagai tawanan perang dan untuk pertanggungjawabannya ditentukan oleh tindakan yang mereka lakukan, dalam hal ini dapat bertindak atas perintah negara, MNC ataupun atas kemauannya sendiri.

Kata Kunci : Konflik Bersenjata, *Private Military Company* (PMC), Status, Pertanggungjawaban

ABSTRACT

The existence of PMC in armed conflict often results in violations against human rights, IHL and customary international law. Because their legal status is still unclear and many countries do not have national regulations that regulate PMC. In addition, the presence of PMC in armed conflict also raises questions regarding who is responsible when PMC personnel commit violations in armed conflict. Therefore, based on the problems above, the author has an interest in reviewing the legal status of PMC and its responsibilities when committing violations in armed conflict.

This research uses normative legal research, which uses a statute approach and a conceptual approach. For the legal materials, primary, secondary, and tertiary legal materials are used. As for the technique of collecting legal materials, it uses literature or literature study techniques, and for the analysis, the deductive method of analysis of legal materials is used.

After conducting the research, it was found that the legal status of PMCs when directly involved in armed conflict is as *unlawful combatant* and is not entitled to get status as a prisoner of war and the system of accountability is determined by the actions they take, in this case, can act on the orders of the state, MNC or of their own accord.

Keywords: Armed Conflict, *Private Military Company* (PMC), Status Accountability

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah :.....	1
1.2 Rumusan Masalah :.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Keaslian Penelitian	11
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1 Jenis Penelitian	13
1.6.2 Pendekatan Penelitian	14
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	15
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	18
1.7 Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG <i>PRIVATE MILITARY COMPANIES</i> (PMC).....	21
2.1 Tinjauan tentang Konflik Bersenjata	21
2.1.1. Konflik Bersenjata	21
2.1.2. Tinjauan tentang <i>International Humanitarian Law</i> (HHI)	24
2.2 Tinjauan tentang Pertanggungjawaban	38
2.2.1. Teori tentang Tanggungjawab Negara.....	38
2.2.2. Tinjauan tentang Tanggungjawab Individu	39
2.3 Tinjauan tentang <i>Private Military Company</i> (PMC)	43
2.3.1. Perusahaan-perusahaan militer swasta.....	44
2.3.2. The Moutreux Document 2008	46
BAB III PEMBAHASAN	48
3.1 Status Hukum <i>Private Military Company</i> (PMC) yang Terlibat Secara Langsung dalam Konflik Bersenjata	48
3.1.1 Kedudukan <i>Private Military Company</i> (PMC) dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI)	48

3.1.2	Perbedaan Peran Antara <i>Private Military Company</i> (PMC) dan Tentara Bayaran dalam Konflik Bersenjata	52
3.1.3	Status Hukum <i>Private Military Company</i> (PMC) yang Terlibat Secara Langsung dalam Konflik Bersenjata	58
3.2	Pertanggungjawaban Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan oleh <i>Private Military Company</i> (PMC) saat Terlibat Secara Langsung dalam Konflik Bersenjata	77
3.2.1.	Pelanggaran-pelanggaran terhadap HHI dan HAM yang dilakukan oleh personil <i>Private Military Company</i> (PMC)	77
3.2.2.	Pihak yang bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh personil <i>Private Military Company</i> (PMC).....	99
BAB IV PENUTUP		125
4.1	Kesimpulan.....	125
4.2	Saran	126
DAFTAR PUSTAKA		128